



BPBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

LAPORAN KINERJA (LKj) BPBD TAHUN 2025

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

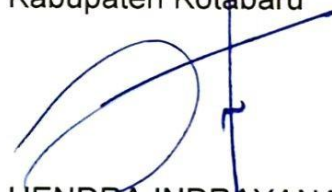
Bersyukur bahwa Rancangan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 telah selesai disusun.

LKj ini disusun sebagai salah satu kewajiban perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029.

Kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, demi perbaikan kekurangan dan kekeliruan Rancangan Laporan LKj ini sehingga bisa menyempurnakan dokumen ini selanjutnya.

Kotabaru, Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotabaru



HENDRA INDRAYANA, S.STP, M.IP
NIP. 19820415 200212 1001
Pembina Tk.I (IV/b)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-2
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	I-2
1.4. Landasan Hukum	I-2
1.5. Sistematika	I-13
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025	II-39
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-39
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2. Realisasi Anggaran	III-39
 BAB IV. PENUTUP	 IV-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Jumlah dan Ketersediaan Pegawai	I-8
1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	I-9
1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	I-10
1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	I-11
1.5. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	I-11
2.1. Perjanjian Kinerja	II-39
3.1. Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja	II-41
3.2. Capaian Kinerja beberapa Tahun	II-41
3.3. Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Renstra	II-42
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	II-42
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	II-42
3.6. Analisis Kegiatan mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-43
3.7. Target dan Realisasi Anggaran	II-48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Struktur Organisasi BPBD	I-8

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Berita Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotabaru di Media Massa Elektronik	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permen PANRB tersebut menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan strategis ke depan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru, sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana, memiliki peran strategis dalam memastikan keselamatan jiwa, perlindungan harta benda, serta kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam upaya memenuhi amanat regulasi tersebut, BPBD Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk efektivitas dan efisiensi pencapaiannya, serta sebagai media akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat secara umum. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan reviu kinerja yang dilakukan secara periodik guna mendukung peningkatan

kualitas pelayanan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi cerminan komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan tanggap terhadap dinamika kebencanaan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru.
14. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Gambaran Umum

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten kotabaru dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kotabaru dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tugas Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu;
- d) Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- e) Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- f) Pengelolaan kesekretariatan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotabaru BPBD mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan, menetapkan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bersifat spesifik di bidang Penanggulangan Bencana.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Memimpin dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
3. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
4. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
5. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
6. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
7. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
8. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik saat bencana;
9. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
10. Memimpin dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
11. Membina dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan; dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :

1. Pengarah Penanggulangan Bencana, yang beranggotakan pejabat pemerintah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli untuk :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
2. Pelaksana Penanggulangan bencana, yang beranggotakan tenaga profesional dan ahli mempunyai fungsi :
 - a. Fungsi Koordinasi, adalah fungsi yang melekat pada unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kotabaru untuk melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, termasuk BPBD Kalsel dan BNPB.
 - b. Fungsi Komando, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD dalam rangka penanganan darurat bencana.melalui pengarahan sumberdaya manusia peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya.
 - c. Fungsi Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diwilayahnya, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD menjadi pelaksana dalam penanganan tanggap darurat bencana dan pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekontruksi.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

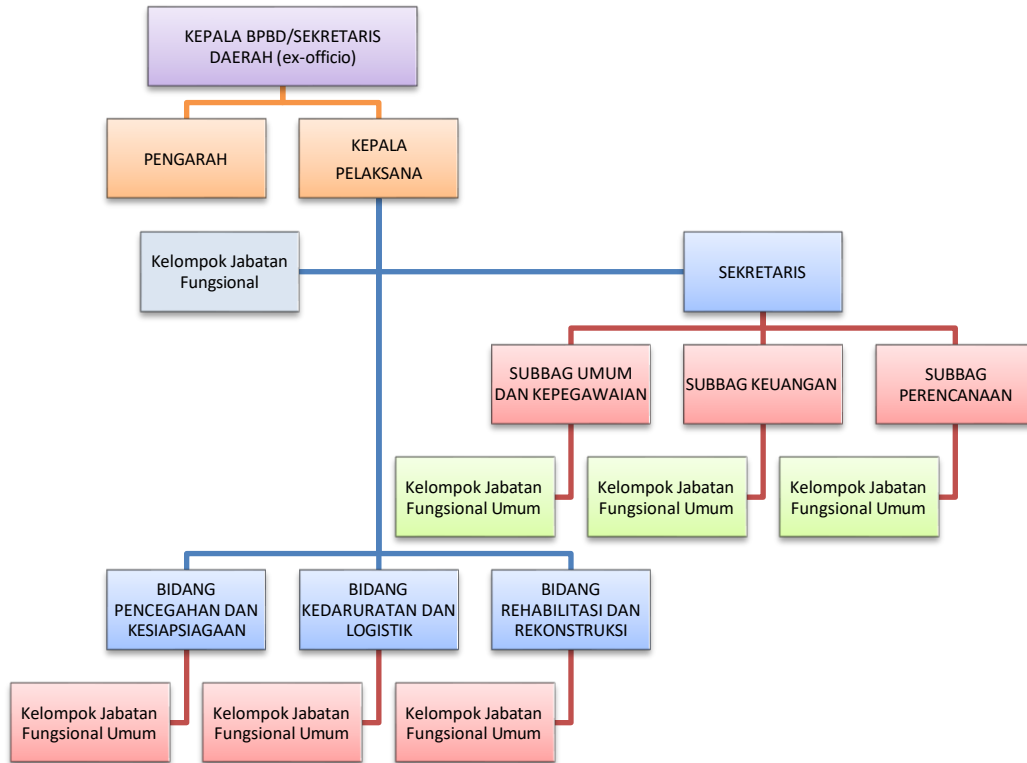
Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kotabaru. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Nomor 185 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotabaru
2. Sekretariat
 - a. Kasubag Perencanaan
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala seksi Pencegahan
 - b. Kepala seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan
 - b. Kepala seksi Logistik
5. Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekonstruksi

Namun struktur organisasi ada perubahan karena terjadinya penghapusan jabatan Kepala Seksi menjadi fungsional sejak Tahun 2022. Struktur organisasi yang sudah disesuaikan disajikan selengkapnya pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BPBD



1.3.3. Kepegawaian

Data kepegawaian mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

BPBD Kabupaten Kotabaru memiliki 44 orang karyawan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 Orang (52,27%), PPPK sebanyak 2 Orang (4,55%), Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 6 Orang (13,64%) serta Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 13 orang (29,54%).

Tabel 1.1.
Jumlah dan Ketersediaan Pegawai

No	Jabatan	Ketersediaan
1	Kepala Pelaksana	ada
2	Sekretaris	ada
3	Fungsional Perencana Ahli Madya	ada
4	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	ada
5	Kabid Kedaruratan dan Logistik	ada
6	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	ada

No	Jabatan	Ketersediaan
7	Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda	ada
8	Kasubag Umum & Kepegawaian	ada
9	Kasubag Perencanaan	ada (Pelaksana Tugas)
10	Kasubag Keuangan	ada
11	Ahli Pertama - Arsiparis	ada
12	Ahli Pertama – Penata Penanggulangan Bencana	ada
13	Penelaah Teknis Kebijakan	ada (6 orang)
14	Pengolah Data dan Informasi	ada (1 orang)
15	Pengadministrasi Perkantoran	ada (7 orang)
Total ASN		25 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ASN

No	Kulifikasi Pendidikan ASN	Jumlah	
I	Pasca Sarjana :		
1	S3 Ilmu Ekonomi	1	Orang
	S2 PSDAL		
2	S2 Ilmu Pemerintahan	1	Orang
	S1 Sains Terapan Pemerintahan		
3	S2 Manajemen	1	Orang
	S1 Ilmu Sosial		
	Jumlah	3	Orang
II	Srata Satu		
1	S1 Ilmu Ekonomi	3	Orang
2	S1 Ilmu Komputer	1	Orang
3	S1 Sains Terapan Pemerintahan	2	Orang
4	S1 Manajemen	1	Orang
5	S1 Meteorologi Terapan	1	Orang
6	S1 Pendidikan	1	Orang
7	S1 Perikanan	1	Orang
8	S1 Planologi	1	Orang
9	S1 Teknik Sipil	1	Orang
	Jumlah	12	Orang
III	Diploma		
1	D3 Manajemen Informatika dan Komputer	1	Orang
2	D3 Transportasi	1	Orang
	Jumlah	2	Orang
IV	SMA	8	Orang

No	Kulifikasi Pendidikan ASN	Jumlah	
	Jumlah	8	Orang
Jumlah Total (I+II+III+IV)		25	Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	Pembina Tk.I	IVb	1	Orang
1	Pembina	IVa	4	Orang
2	Penata Tk.I	IIIId	2	Orang
3	Penata	IIIc	2	Orang
4	Penata Muda Tk.I	IIIb	5	Orang
5	Penata Muda	IIIa	4	Orang
6	Pengatur Tk I	IIId	2	Orang
7	Pengatur	IIc	1	Orang
8	Pengatur Muda Tk.I	IIb	1	Orang
9	Pengatur Muda	IIa	1	Orang
10	-	IX	2	Orang
		Jumlah	25	Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan Struktural	Jumlah	
1.	Pejabat Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4	Orang
3.	Pejabat Fungsional Eselon III	1	Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV	2	Orang
5.	Pejabat Fungsional Eselon IV	1	Orang
	Jumlah	9	Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

1.3.4. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru masih kurang. Jumlah asset/barang inventaris (Peralatan dan Mesin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikelola dan digunakan dalam menunjang sejumlah kegiatan baik urusan wajib pemerintahan dan pelayanan masih terbatas.

Kondisi ini tentunya mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan maupun fungsi pelayanan.

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	Jenis	Uraian	Tahun	Satuan	Jumlah	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Alat Transportasi							
	Jenis Angkutan Darat							
1.1.	Kendaraan Roda 2	Sepeda Motor Axelo	2014	Unit	2	2	-	-
		Sepeda Motor Trunder	1996	Unit	1	-	1	-
		Sepeda Motor Trail	2014	Unit	3	2	1	-
1.2.	Kendaraan Roda 4	Mobil Inova	2016	Unit	1	1	-	-
		Mobil Ford	2016	Unit	1	1	-	-
		Mobil Hilux	2014	Unit	1	1	-	-
		Mobil Box	2021	Unit	1	1	-	-
		Mobil Pick up L 300	2020	Unit	1	1	-	-
1.3.	Kendaraan Roda >4	Mobil Tengki Air	2014	Unit	2	2	-	-

No	Jenis	Uraian	Tahun	Satuan	Jumlah	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Mobil Serbaguna	2017	Unit	1	1	-	-
	Jenis Angkutan Laut							
1.4.	Kapal Penyelamat	Perahu Karet	2013	Unit	1	-	-	1
		Perahu Karet	2018	Unit	2	-	2	
1.5.	Speedboad	Speedboad Mesin1	2017	Unit	1	--	1	
		Speedboad Mesin2	2017	Unit	1	-	-	1
2.	Alat Komunikasi							
	Handy Talky	Handy Talky	2020	Unit	20	9	7	4
	Radio Pemancar	Radio SSB	2012	Unit	2	-	2	-
	Peralatan Komunikasi Lainnya	GPS	2012	Unit	2	-	-	2
3	Peralatan Kesehatan							
	Peralatan Kesehatan Lainnya	Valbet	2012	Unit	5	5	-	-
4	Peralatan Air Bersih							
	Mobil Tangki Air	Mobil Tengki Air	2014	Unit	2	2	-	-
	Peralatan Air Bersih Lainnya		2018	Unit	1	-	2	-
5	Peralatan Hunian Sementara							
	Generator	Generator	2012	Unit	2	-	2	-
	Peralatan Hunian lainnya	Tenda Posko, Tenda Pengungsi, Tenda Keluarga (keong)	2020	Unit	1	-	1	-
6.	Posko							
	Posko Bencana/Kebakaran	Posko Karhutla		Unit	1	1	-	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

1.3.5. Permasalahan

Beberapa permasalahan utama dari organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diantaranya adalah:

1. Beberapa dokumen masih dalam proses penyelesaian dalam hal penyelerasan dengan BNPB sehingga dapat diselesaikannya regulasi, seperti dokumen Kajian Risiko Bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Pelaksanaan dan pengalokasian anggaran secara tepat untuk beberapa sub kegiatan seperti pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan informasi rawan bencana masih perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
4. Perlunya kapasitas atau kompetensi yang khusus bagi pegawai untuk menangani beberapa kegiatan penanggulangan bencana.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematikan penyusunan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berikut ini uraian Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.

2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran , Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Persentase terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewaspadaan Bencana	Persentase kesadaran Masyarakat terhadap Kewaspadaan Bencana

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) (Sebelum dan Sesudah)

Indikator Kinerja Utama/Indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan dari Sasaran strategis, Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2021-2025 Sebelum Perubahan

No	KINERJA UTAMA (Tujuan/Sasaran)	INDIKATOR	Formulasi	Capaian Awal	TARGET				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewaspadaan Bencana	Persentasi Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		Persentasi Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2025-2029 Perubahan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
TUJUAN	SASARAN					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(02)	(03)	(04)		(05)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	$IRB = (\text{Bahaya (H)} \times \text{Kerentanan (R)}) / \text{Kapasitas (C)})$	152.79	152.59-152.99	152.29-152.69	152.09-152.49	152.79-152.19	151.49-151.89	151.19-151.59
	Terwujudnya daerah yang siap dan mampu menghadapi potensi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	Indeks Ketahanan Daerah = Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan + Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu + Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Pengembangan	0,50	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60

				Sistem Pemulihan Bencana							
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Total Nilai Evaluasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	60,01	60,01	63	65	67	70	70

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	100%
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SESUDAH PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
----	---------	----	-------------------	--------

1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	100%
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 (Sesudah)

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian		Belanja	Target Capaian Kinerja	
		Anggaran	Target	Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3.268.395.200		
	Program Penanggulangan Bencana	3.268.395.200		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana			
	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana		100	%
	Program Penanggulangan Bencana	254.901.250		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana			
	Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana		100	%
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	254.901.250		

		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana			
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan rawan bencana		726	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.601.000		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
		Persentase kualitas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang tepat waktu dan valid		100	%
	-	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	39.415.000		
		Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan			
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		200	Orang
	-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	278.805.000		
		Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			

		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		3	Kawasan
	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	89.841.000		
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		4	Unit Usaha
	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	79.700.000		
		Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		25	Unit Usaha
	-	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	39.255.000		
		Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi			
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		25	Unit Usaha
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	317.279.000		

		Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik korban bencana		180	Orang
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	317.279.000		
		Terlaksananya Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana			
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		6	Kali
		- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	317.279.000		
		Terlaksananya distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		6	Kali
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	317.279.000		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	317.279.000		
		Persentase kualitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana valid dan tepat waktu	317.279.000		

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	317.279.000		
		- Tersusunnya dokumen penataan kelembagaan bencana	317.279.000		
		- Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	317.279.000		
		- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	317.279.000		
		- Terlaksananya kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	317.279.000		
		- Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	317.279.000		
		- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	317.279.000		
		- Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana	317.279.000		
		- Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	317.279.000		
NON URUSAN			13.377.526.016		
Nilai SAKIP					
Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan				100	%
Jumlah Inovasi				1	

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.377.526.016		
-	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan		100	%
-	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			
	Persentase kualitas perencanaan perangkat daerah		100	%
-	Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan Administrasi Keuangan			
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan Administrasi Keuangan		100	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	729.774.000		
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan berkualitas dan tepat waktu		100	%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.518.000		
	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		3	dokumen
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.200.000		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	dokumen
		-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.470.000		
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	dokumen
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	381.650.000		
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	laporan
		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.936.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.893.988.791		
			Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah			
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100	%
		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.975.358.791		

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26	orang/bulan
		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	676.144.500		
			Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	dokumen
		-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.360.000		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	dokumen
		-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	193.125.500		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	dokumen
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	dokumen
		-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.000.000		

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	dokumen
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4	Laporan
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000		
		Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	194.055.200		
		Terselenggaranya administrasi barang milik daerah dengan baik			
		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*)		100	%
	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	146.830.200		

		Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	laporan
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	47.225.000		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	laporan
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	107.986.000		
		Terselenggaranya pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah*)			
		Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah*)		100	%
	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			
		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	
	-	Pengolahan Data Retribusi Daerah	107.986.000		
		Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah			
		Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		1	laporan

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.140.000		
		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Sesuai aturan			
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Sesuai aturan		100	%
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.500.000		
		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3	paket
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	153.640.000		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		9	orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.211.213.750		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum SKPD Sesuai aturan		100	%
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.401.350		
		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	paket

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.222.000		
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	paket
		-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000		
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12	paket
		-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	530.539.400		
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	paket
		-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.781.000		
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	paket
		-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.270.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75	Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.401.000		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan			

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan		100	%
	-	Pengadaan Mebel	100.868.000		
		Terlaksananya Pengadaan Mebel			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4	unit
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.533.000		
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.511.600.000		
		Tersedianya Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib			
		Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib		100	%
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	laporan
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.000.000		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	laporan

LAPORAN KINERJA BPBD TAHUN 2025
KABUPATEN KOTABARU

		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.940.600.000		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60	laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.300.000		
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan			
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD sesuai Kebutuhan		100	%
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.000.000		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	unit
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.300.000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40	unit
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000		

			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit
		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit
		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 berdasarkan agenda rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 tahun pertama yang penjabarannya termuat dalam agenda rencana kerja (RENJA) tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam program/ kegiatan tahun anggaran 2025. Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengukur capaian keberhasilan pembangunan bidang kebencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 Sebelum Perubahan dibandingkan dengan target perjanjian

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	Peresentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jiwa	334.158	334.158	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jiwa	4.731	4.731	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jiwa	300	300	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 Setelah Perubahan dibandingkan dengan target perjanjian

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketahanan darah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,59	108,02	100%	
		Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,5	0,50	100%	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	60,1	66,35	100%	

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 sebelum perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Realisasi Mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya sebesar	Realisasi Mengalami Penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jiwa	334.158	334.158	100%	334.158	334.158	100%	0 (Tetap)	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jiwa	4.731	4.731	100%	4.731	4.731	100%	0 (Tetap)	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jiwa	300	300	100%	300	300	100%	0 (Tetap)	

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 sesudah perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Realisasi Mengalami Peningkatandari Tahun sebelumnya sebesar	Realisasi Mengalaami Penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jiwa	334.158	334.158	100%					
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jiwa	4.731	4.731	100%					
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jiwa	300	300	100%					
2.	Meningkatnya ketahanan darah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai				152,59	108,02	100%		
		Indeks Ketahanan Daerah	Nilai				0,5	0,50	100%		
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai				60,1	66,35	100%		

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 sebelum perubahan dibandingkan dengan target dalam
pembangunan jangka menengah (RENSTRA)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RENSTRA	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	6	7	8
1	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Indeks Potensi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jiwa	324.641	324.641	100%
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jiwa	53.739	53.739	100%
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jiwa	300	300	100%

Sumber : Data Statistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 setelah perubahan dibandingkan dengan target
dalam pembangunan jangka menengah (RENSTRA)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RENSTRA	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1		3	4	6	7	8
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	persen	100	100	100
		Indeks Ketahanan Daerah	persen	100	100	100
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	persen	100	100	100

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	100 %	100 %	100 %
		Indeks Ketahanan Daerah	100 %	100 %	100 %
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.8
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
(Sebelum Perubahan)

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FAKTOR KEBERHASILAN	FAKTOR KEGAGALAN	TINDAKLANJUT
1	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Indeks Potensi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan kinerja BPBD	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompatibel berdasarkan pekerjaannya	Peningkatan kapasitas SDM
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Koordinasi dengan instansi lain yang semakin baik, menjadikan tujuan BPBD cepat terlaksana	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang kompatibel
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semakin dicukupkannya anggaran yang mendekati rencana kerja yang dilaksanakan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompatibel berdasarkan pekerjaannya	Peningkatan kapasitas SDM

Tabel 3.9
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
(Setelah Perubahan)

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FAKTOR KEBERHASILAN	FAKTOR KEGAGALAN	TINDAKLANJUT
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan kinerja BPBD	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompatibel berdasarkan pekerjaannya	Peningkatan kapasitas SDM
		Indeks Ketahanan Daerah	Koordinasi dengan instansi lain yang semakin baik, menjadikan tujuan BPBD cepat terlaksana	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang kompatibel
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Semakin dicukupkannya anggaran yang mendekati rencana kerja yang dilaksanakan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompatibel berdasarkan pekerjaannya	Peningkatan kapasitas SDM

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan hasil Kinerja IKU
sebelum perubahan yang telah dicapai

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Hal Kewaspadaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	324.641	324.641	100	442,443,350	194,528,458	43,96%	227,44
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	53.739	53.739	100	783,787,550	403,967,119	51,54%	194,02
		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300	300	100	1,996,527,200 0	1,219,428,68 3	61,07%	163,72

Pelaksanaan program penanggulangan bencana menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

1. Warga Negara Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana

Persentase warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana ditargetkan sebesar 324.641 jiwa, dengan realisasi 324.641 jiwa atau capaian 100%. Penyerapan anggaran mencapai 43,96% dengan tingkat efisiensi 227,44%.

2. Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditargetkan 53.739 Jiwa, dengan realisasi 53.739 jiwa atau capaian 100%. Penyerapan anggaran sebesar 51,54% dengan tingkat efisiensi 194,02%.

3. Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan 300 jiwa, dengan realisasi 300 jiwa atau capaian 100%. Penyerapan anggaran mencapai 61,07% dengan tingkat efisiensi 163,72%. Capaian ini merupakan yang tertinggi, menandakan keberhasilan besar dalam peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Secara umum, program pembangunan menunjukkan hasil yang positif dengan capaian kinerja yang tinggi pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kewaspadaan terhadap bencana. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi serta efisiensi yang baik menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif, meskipun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut pada indikator - indikator yang belum optimal

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan hasil Kinerja IKU
setelah perubahan yang telah dicapai

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Targe t	Realisa si	Capai an Kinerj a (%)	Pagu	Realisasi	Penyer ap an Anggar an (%)	Tingka t Efisien si (%)
1	Meningkatn ya Ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	152,59	108,02	100	16,645,921,216	10,651,927,075	63,99%	156,27
		Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,50	100	3,268,395,200	2,906,940,120	88,94%	112,43
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	60,1	66,35	100	13,377,526,016	7,744,986,955	57,90%	172,72

Pelaksanaan program penanggulangan bencana daerah kabupaten kotabaru sepanjang periode pelaporan menunjukkan hasil yang positif dengan capaian kinerja yang tinggi serta tingkat efisiensi anggaran yang baik.

1. Indeks Risiko Bencana

Laju pertumbuhan indeks risiko bencana nilainya ditargetkan sebesar 152,59 dengan realisasi nilainya 108,02. Capaian ini setara dengan 100% dari target yang ditetapkan. Penyerapan anggaran mencapai 63,99% dengan tingkat efisiensi sebesar 156,27%, menunjukkan bahwa output kinerja relatif optimal dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Pertumbuhan indeks ketahanan daerah nilainya ditargetkan 0,5 dan terealisasi sebesar 0,50 atau 100% dari target. Penyerapan anggaran sebesar 88,94% dengan

tingkat efisiensi 112,43%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

3. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai sakip perangkat daerah ditargetkan nilainya 60,1 dan berhasil direalisasikan senilai 66,35, melampaui target dengan capaian 100%. Penyerapan anggaran mencapai 57,90% dan tingkat efisiensi 172,72%, menjadikan indikator ini sebagai capaian terbaik di antara seluruh sasaran strategis.

Secara keseluruhan, seluruh sasaran strategis berhasil mencapai target kinerja, bahkan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi serta efisiensi di atas pada semua indikator menunjukkan bahwa program kebencanaan telah dilaksanakan dengan baik, efektif, dan memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kinerja penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru telah melakukan efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian semua sasaran. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja dengan serapan anggaran yang Tingkat efisiensinya besar.

Dibawah ini disajikan tabel Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan hasil Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebelum dan sesudah perubahan yang telah dicapai

Tabel 3.12

Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan hasil Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebelum perubahan yang telah dicapai

No	Uraian			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis : Terwujudnya daerah yang siap dan mampu menghadapi potensi bencana			Rp 3,268,395,200	Rp 2,906,840,620	88.94			
	Indikator Kinerja SS : Indeks Ketahanan Daerah						0.5	0.5	100
		Program 1.1 : Program Penanggulangan Bencana		Rp 3,268,395,200	Rp 2,906,840,620	88.94			
		Sasaran Program 1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana							
		Indikator Kinerja Program : Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana					100	90.88	90.88
			Kegiatan 1.1.1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 254,901,250	Rp 239,982,803	94.15			
			Sasaran Kegiatan 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas cakupan wilayah yang diberi informasi rawan bencana kabupaten/kota				726	726	100
			Sub Kegiatan 1.1.1.1 : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 254,901,250	Rp 239,982,803	94.15			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.1.1 : Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan :Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan rawan bencana				726	726	100
			Kegiatan 1.1.2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 515,895,050	Rp 370,956,286	71.91			
			Sasaran Kegiatan 1.1.2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang tepat waktu dan valid				364	325.9	89.53
			Sub Kegiatan 1.1.2.1 : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 39,415,000	Rp 36,415,000	92.39			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.1 : Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200	190	95
			Sub Kegiatan 1.1.2.2 : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 278,805,000	Rp 200,803,309	72.02			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.2 : Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)				3	2	66.67
			Sub Kegiatan 1.1.2.3 : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp 122,958,500	Rp 106,715,552	86.79			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.3 : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150	133	88.67
			Sub Kegiatan 1.1.2.4 : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp 44,190,000	Rp -	0			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.4 : Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10	0	0
			Sub Kegiatan 1.1.2.5 : Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Rp 30,526,550	Rp 27,022,425	88.52			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.5 : Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					1	0.9	90
			Kegiatan 1.1.3 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1,392,846,900	Rp 1,206,370,930	86.61				
			Sasaran Kegiatan 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
			Indikator Kinerja Kegiatan:Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik korban bencana					400	346	86.5
			Sub Kegiatan 1.1.3.1 : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1,090,151,900	Rp 990,497,100	90.86				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.3.1 :Terlaksananya Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan :Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					300	274	91.33
			Sub Kegiatan 1.1.3.2 : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 302,695,000	Rp 215,873,830	71.32				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.3.2 : Terlaksananya distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100	72	72

			Kegiatan 1.1.4 : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 1,104,752,000	Rp 1,089,530,601	98.62			
			Sasaran Kegiatan 1.1.4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana valid dan tepat waktu				5	5	100
			Sub Kegiatan 1.1.4.1 : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 199,930,000	Rp 195,249,000	97.66			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.1 : Tersusunnya dokumen penataan kelembagaan bencana						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1	1	100
			Sub Kegiatan 1.1.4.2 : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 704,822,000	Rp 700,279,601	99.36			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.2 : Terlaksananya kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3	3	100
			Sub Kegiatan 1.1.4.3 : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 200,000,000	Rp 194,002,000	97			
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.3 : Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1	1	100
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah			Rp 13,377,526,016	Rp 7,744,986,955				
	Indikator Kinerja SS : Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
		Program 2.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 13,377,526,016	Rp 7,744,986,955	57.9			
		Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan							
		Indikator Kinerja Program : Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah					100	100	100
			Kegiatan 2.1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 121,912,850	Rp 109,549,750	89.86			
			Sasaran Kegiatan 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						
			Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35	35	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 31,896,000	Rp 26,389,900	82.74			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.1 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun				8	8	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 6,663,350	Rp 6,663,350	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.2 : Tersusunnya Dokumen RKA SKPD						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5,596,000	Rp 5,596,000	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.3 : Tersusunnya Perubahan RKA SKPD						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4,128,600	Rp 4,128,600	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.4 : Tersusunnya Dokumen DPA SKPD						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 4,181,500	Rp 4,181,500	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.5 : Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp 28,837,400	Rp 24,257,450	84.12			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.6 : Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					11	11	100
			Sub Kegiatan 2.1.1.7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 40,610,000	Rp 38,332,950	94.39				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.7 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12	12	100
			Kegiatan 2.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10,324,630,116	Rp 4,883,328,397	47.3				
			Sasaran Kegiatan 2.1.2 : Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu					350	350	100
			Sub Kegiatan 2.1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,970,092,616	Rp 4,603,677,897	46.17				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.1 : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					322	322	100
			Sub Kegiatan 2.1.2.2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 18,957,500	Rp 10,257,500	54.11				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.2 : Penyusunan Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	12	100

			Sub Kegiatan 2.1.2.3 : - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rp 310,087,500	Rp 244,177,500	78.74			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.3 : Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.2.4 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 13,719,000	Rp 13,442,000	97.98			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.4 : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2	2	100
			Sub Kegiatan 2.1.2.5 : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 11,773,500	Rp 11,773,500	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.5 : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	100
			Kegiatan 2.1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 93,300,000	Rp 93,250,000	99.95			
			Sasaran Kegiatan 2.1.3 : Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian						

			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu				14	14	100
			Sub Kegiatan 2.1.3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 60,000,000	Rp 59,950,000	99.92			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.3.1 : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	100
			Sub Kegiatan 2.1.3.2 : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 33,300,000	Rp 33,300,000	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.3.2 : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13	13	100
			Kegiatan 2.1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,127,766,350	Rp 1,064,742,669	94.41			
			Sasaran Kegiatan 2.1.4 : Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				61	61	100
			Sub Kegiatan 2.1.4.1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 4,520,600	Rp 4,357,000	96.38			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.1 : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.4.2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 35,283,000	Rp 34,676,500	98.28				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.2 : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.4.3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 278,449,000	Rp 220,737,000	79.27				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.3 : Tersedianya Bahan Logistik kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.4.4 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8,159,950	Rp 6,239,800	76.47				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.4 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.4.5 : Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 21,610,500	Rp 20,906,400	96.74				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.5 : Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12	12	100

			Sub Kegiatan 2.1.4.6 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 779,743,300	Rp 777,825,969	99.75			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.6 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	1	100
			Kegiatan 2.1.5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 807,461,000	Rp 766,304,000	94.9			
			Sasaran Kegiatan 2.1.5 : Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				13	13	100
			Sub Kegiatan 2.1.5.1 : Pengadaan Mebel	Rp 69,958,000	Rp 68,820,000	98.37			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.5.1 : Tersedianya Mebel Sesuai Kebutuhan						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3	3	100
			Sub Kegiatan 2.1.5.2 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 737,503,000	Rp 697,484,000	94.57			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.5.2 : Tersedianya peralatan dan mesin lainnya						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10	10	100
			Kegiatan 2.1.6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 347,593,000	Rp 302,278,047	86.96			
			Sasaran Kegiatan 2.1.6 : Meningkatnya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36	36	100
			Sub Kegiatan 2.1.6.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	4,213,000	Rp	3,450,000	81.89	
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.1 : Tersedianya jasa surat menyurat						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.6.2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	97,380,000	Rp	52,828,047	54.25	
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.2 : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	12	100
			Sub Kegiatan 2.1.6.3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	246,000,000	Rp	246,000,000	100	
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.3 : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	12	100
			Kegiatan 2.1.7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	554,862,700	Rp	525,534,092	94.71	
			Sasaran Kegiatan 2.1.7 : Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				14	14	100

			Sub Kegiatan 2.1.7.1 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 74,543,850	Rp 60,423,000	81.06			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.1 : Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4	4	100
			Sub Kegiatan 2.1.7.2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 380,318,850	Rp 365,111,300	96			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.2 :Tersedianya Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9	9	100
			Sub Kegiatan 2.1.7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 100,000,000	Rp 99,999,792	100			
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.3 : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	1	100
TOTAL				Rp 16,645,921,216					

Analisis efisiensi pengguna sumber daya dilakukan dengan pengukuran aspek realisasi anggaran (biaya). Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru ada 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari Tahun 2025 dengan seluruh Alokasi Anggaran Rp. 14.336.593.733 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 13.551.545.233 dan Belanja Modal sebesar Rp.785.048.500. Tingkat pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih optimal, yaitu sebesar 88,94%, yang mencerminkan terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan.

Selain itu, tingkat efisiensi tercatat sebesar 102,18. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya efektif dalam mencapai sasaran, tetapi juga mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan anggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efisien, akuntabel, dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan hasil Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan Yang telah dicapai

No	Uraian			Belanja			Capaian Kinerja			Tingkat Efisiensi
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
1	Sasaran Strategis : Terwujudnya daerah yang siap dan mampu menghadapi potensi bencana			Rp 3,268,395,200	Rp 2,906,840,620	88.94				
	Indikator Kinerja SS : Indeks Ketahanan Daerah						0.5	0.5	100	0.56
		Program 1.1 : Program Penanggulangan Bencana		Rp 3,268,395,200	Rp 2,906,840,620	88.94				
		Sasaran Program 1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana								
		Indikator Kinerja Program : Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana					100	90.88	90.88	102.18
			Kegiatan 1.1.1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 254,901,250	Rp 239,982,803	94.15				
			Sasaran Kegiatan 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas cakupan wilayah yang diberi informasi rawan bencana kabupaten/kota				726	726	100	771.13
			Sub Kegiatan 1.1.1.1 : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 254,901,250	Rp 239,982,803	94.15				

			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.1.1 : Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan :Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan rawan bencana				726	726	100	771.13
			Kegiatan 1.1.2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp	515,895,050	Rp	370,956,286	71.91		
			Sasaran Kegiatan 1.1.2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang tepat waktu dan valid				364	325.9	89.53	453.23
			Sub Kegiatan 1.1.2.1 : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp	39,415,000	Rp	36,415,000	92.39		
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.1 : Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200	190	95	205.65
			Sub Kegiatan 1.1.2.2 : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp	278,805,000	Rp	200,803,309	72.02		

			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.2 : Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)				3	2	66.67	2.78
			Sub Kegiatan 1.1.2.3 : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp	122,958,500	Rp	106,715,552	86.79		
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.3 : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150	133	88.67	153.24
			Sub Kegiatan 1.1.2.4 : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp	44,190,000	Rp	-	0		
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.4 : Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10	0	0	-
			Sub Kegiatan 1.1.2.5 : Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Rp	30,526,550	Rp	27,022,425	88.52		

			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.2.5 : Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1	0.9	90	1.02
			Kegiatan 1.1.3 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1,392,846,900	Rp 1,206,370,930	86.61				
			Sasaran Kegiatan 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik korban bencana				400	346	86.5	399.48
			Sub Kegiatan 1.1.3.1 : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1,090,151,900	Rp 990,497,100	90.86				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.3.1 : Terlaksananya Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				300	274	91.33	301.57
			Sub Kegiatan 1.1.3.2 : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 302,695,000	Rp 215,873,830	71.32				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.3.2 : Terlaksananya distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana							

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100	72	72	100.96
			Kegiatan 1.1.4 : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 1,104,752,000	Rp 1,089,530,601	98.62				
			Sasaran Kegiatan 1.1.4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
			Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kualitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana valid dan tepat waktu				5	5	100	5.07
			Sub Kegiatan 1.1.4.1 : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 199,930,000	Rp 195,249,000	97.66				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.1 : Tersusunnya dokumen penataan kelembagaan bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1	1	100	1.02
			Sub Kegiatan 1.1.4.2 : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 704,822,000	Rp 700,279,601	99.36				
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.2 : Terlaksananya kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi				3	3	100	3.02

			dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan							
			Sub Kegiatan 1.1.4.3 : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	200,000,000	Rp	194,002,000	97		
			Sasaran Sub Kegiatan 1.1.4.3 : Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					1	1	100
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah			Rp	13,377,526,016	Rp	7,744,986,955			
	Indikator Kinerja SS : Nilai SAKIP Perangkat Daerah									
		Program 2.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp	13,377,526,016	Rp	7,744,986,955	57.9		
		Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya kualitas layanan dukungan administrasi kesekretariatan								
		Indikator Kinerja Program : Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah						100	100	100
			Kegiatan 2.1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	121,912,850	Rp	109,549,750	89.86		
			Sasaran Kegiatan 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							

			Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35	35	100	38.95
			Sub Kegiatan 2.1.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	31,896,000	Rp	26,389,900	82.74		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.1 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun				8	8	100	9.67
			Sub Kegiatan 2.1.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp	6,663,350	Rp	6,663,350	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.2 : Tersusunnya Dokumen RKA SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	100	1.00
			Sub Kegiatan 2.1.1.3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	5,596,000	Rp	5,596,000	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.3 : Tersusunnya Perubahan RKA SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	100	1.00
			Sub Kegiatan 2.1.1.4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	4,128,600	Rp	4,128,600	100		

			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.4 : Tersusunnya Dokumen DPA SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	100	1.00
			Sub Kegiatan 2.1.1.5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	4,181,500	Rp	4,181,500	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.5 : Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	100	1.00
			Sub Kegiatan 2.1.1.6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp	28,837,400	Rp	24,257,450	84.12		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.6 : Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11	11	100	13.08
			Sub Kegiatan 2.1.1.7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	40,610,000	Rp	38,332,950	94.39		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.7 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12	12	100	12.71
			Kegiatan 2.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10,324,630,116	Rp	4,883,328,397	47.3		
			Sasaran Kegiatan 2.1.2 : Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				350	350	100	739.99
			Sub Kegiatan 2.1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	9,970,092,616	Rp	4,603,677,897	46.17		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.1 : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322	322	100	697.35
			Sub Kegiatan 2.1.2.2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	18,957,500	Rp	10,257,500	54.11		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.2 : Penyusunan Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	12	100	22.18
			Sub Kegiatan 2.1.2.3 : - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rp	310,087,500	Rp	244,177,500	78.74		

			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.3 : Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	12	100	15.24
			Sub Kegiatan 2.1.2.4 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	13,719,000	Rp	13,442,000	97.98		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.4 : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2	2	100	2.04
			Sub Kegiatan 2.1.2.5 : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	11,773,500	Rp	11,773,500	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.5 : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	100	2.00
			Kegiatan 2.1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	93,300,000	Rp	93,250,000	99.95		

			Sasaran Kegiatan 2.1.3 : Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu				14	14	100	14.01
			Sub Kegiatan 2.1.3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	60,000,000	Rp	59,950,000	99.92		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.3.1 : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	100	1.00
			Sub Kegiatan 2.1.3.2 : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	33,300,000	Rp	33,300,000	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.3.2 : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13	13	100	13.00
			Kegiatan 2.1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,127,766,350	Rp	1,064,742,669	94.41		
			Sasaran Kegiatan 2.1.4 : Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				61	61	100	64.61
			Sub Kegiatan 2.1.4.1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp	4,520,600	Rp	4,357,000	96.38		

			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.1 : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12	12	100	12.45
			Sub Kegiatan 2.1.4.2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	35,283,000	Rp	34,676,500	98.28		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.2 : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12	12	100	12.21
			Sub Kegiatan 2.1.4.3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	278,449,000	Rp	220,737,000	79.27		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.3 : Tersedianya Bahan Logistik kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12	12	100	15.14
			Sub Kegiatan 2.1.4.4 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	8,159,950	Rp	6,239,800	76.47		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.4 : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12	12	100	15.69

			Sub Kegiatan 2.1.4.5 : Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 21,610,500	Rp 20,906,400	96.74				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.5 : Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12	12	100	12.40
			Sub Kegiatan 2.1.4.6 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 779,743,300	Rp 777,825,969	99.75				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.4.6 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	1	100	1.00
			Kegiatan 2.1.5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 807,461,000	Rp 766,304,000	94.9				
			Sasaran Kegiatan 2.1.5 : Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				13	13	100	13.70
			Sub Kegiatan 2.1.5.1 : Pengadaan Mebel	Rp 69,958,000	Rp 68,820,000	98.37				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.5.1 : Tersedianya Mebel Sesuai Kebutuhan							

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3	3	100	3.05
			Sub Kegiatan 2.1.5.2 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	737,503,000	Rp	697,484,000	94.57		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.5.2 : Tersedianya peralatan dan mesin lainnya							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10	10	100	10.57
			Kegiatan 2.1.6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	347,593,000	Rp	302,278,047	86.96		
			Sasaran Kegiatan 2.1.6 : Meningkatnya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36	36	100	41.40
			Sub Kegiatan 2.1.6.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	4,213,000	Rp	3,450,000	81.89		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.1 : Tersedianya jasa surat menyurat							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	12	100	14.65
			Sub Kegiatan 2.1.6.2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	97,380,000	Rp	52,828,047	54.25		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.2 : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik							

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	12	100	22.12
			Sub Kegiatan 2.1.6.3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	246,000,000	Rp	246,000,000	100		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.6.3 : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	12	100	12.00
			Kegiatan 2.1.7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	554,862,700	Rp	525,534,092	94.71		
			Sasaran Kegiatan 2.1.7 : Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				14	14	100	14.78
			Sub Kegiatan 2.1.7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	74,543,850	Rp	60,423,000	81.06		
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.1 : Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya							

			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4	4	100	4.93
			Sub Kegiatan 2.1.7.2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 380,318,850	Rp 365,111,300	96				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.2 : Tersedianya Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9	9	100	9.37
			Sub Kegiatan 2.1.7.3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 100,000,000	Rp 99,999,792	100				
			Sasaran Sub Kegiatan 2.1.7.3 : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	1	100	1.00
TOTAL				Rp 16,645,921,216						

Analisis efisiensi pengguna sumber daya dilakukan dengan pengukuran aspek realisasi anggaran (biaya). Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru ada 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari Tahun 2025 dengan seluruh Alokasi Anggaran Rp. 14.336.593.733 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 13.551.545.233 dan Belanja Modal sebesar Rp.785.048.500. Tingkat pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih optimal, yaitu sebesar 88,94%, yang mencerminkan terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan.

Selain itu, tingkat efisiensi tercatat sebesar 102,18. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya efektif dalam mencapai sasaran, tetapi juga mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan anggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efisien, akuntabel, dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru ini disusun sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab institusional dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan ini menggambarkan capaian kinerja BPBD Kabupaten Kotabaru selama periode pelaporan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi guna mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Kotabaru telah berupaya secara optimal dalam mencapai target kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan tugas, serta dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, kami membuka diri terhadap segala bentuk masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak, guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

BPBD Kabupaten Kotabaru senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik, cepat, dan responsif demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas BPBD serta berkontribusi

dalam penyusunan laporan kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja BPBD Kabupaten Kotabaru, serta menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan kebijakan dan langkah strategis di masa mendatang